

## Deteksi Dini Potensi Ancaman dari Transformasi Organisasi Radikal pada Masyarakat Sulawesi Barat

Gia Ayu Fita <sup>1,\*</sup>; Aco Nata Saputra <sup>2</sup> ; Muhammad Alif Mulky <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; [giaayufita@unsulbar.ac.id](mailto:giaayufita@unsulbar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; [aconatasaputra@unsulbar.ac.id](mailto:aconatasaputra@unsulbar.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; [alifmulqy20@gmail.com](mailto:alifmulqy20@gmail.com)

\*Correspondence : [giaayufita@unsulbar.ac.id](mailto:giaayufita@unsulbar.ac.id)

### ABSTRAK

Gerakan-gerakan perubahan yang muncul dan disertai kekerasan dan merugikan masyarakat, biasanya disebut gerakan radikal atau ciri dari perbuatan radikalisme. Kebanyakan kegiatan radikal yang terjadi semata-mata ingin mengubah suatu sistem atau tatanan pemerintahan dengan suatu sistem yang dimana memasukkan pemahaman suatu agama. Dimana menurutnya, agamanya adalah yang paling benar dan paling sesuai. Radikalisme sendiri adalah sikap yang mengarah ke aksi terorisme. Banyak mereka mengklaim kegiatan mereka mengatasnamakan salah satu agama. Misalnya Islam, agar mendapatkan simpati dari beberapa masyarakat Muslim dunia untuk berbagai bentuk dukungan terhadap aksi mereka. Pasca pembubaran ormas-ormas yang bertemakan Islam di tahun 2020, malah ditengarai akan menimbulkan banyak kombatan-kombatan kecil di tengah masyarakat. Bagi peneliti ini sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut menimbulkan ancaman bagi stabilitas nasional yang mengarah konflik internal bahkan eksternal. Peneliti akan melihat beberapa pola yang ada, khususnya di provinsi Sulawesi Barat. Dimana masyarakatnya menganut Islam Nusantara atau NU tradisional, tetapi bibit-bibit radikalisme pasca pembubaran ormas di tahun 2020. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul sebagai kelompok-kelompok kecil yang lebih *soft* atau lebih bisa diterima masyarakat baik yang belum terpapar sebelumnya sama sekali. Peneliti menggunakan konsep *conflict prediction models* untuk menganalisis pola dari radikalisme pada masyarakat dari tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, Majene, Polewali Mandar) untuk menguji ancaman yang muncul dan mempengaruhi kebijakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep kebijakan publik untuk membuat peraturan dan kebijakan bagi pemangku kebijakan untuk menghindari ancaman yang akan datang demi kepentingan publik.

**Kata kunci:** *ancaman; konflik; radikalisme; terorisme.*

### ABSTRACT

Movements for change that emerge and are violent and harmful to society are usually called radical movements or the hallmarks of radicalism. Most radical activities that occur solely want to change a system or order of government with a system that incorporates the understanding of religion. According to him, his religion is the most correct and appropriate. Radicalism itself is an attitude that leads to acts of terrorism. Many of them claim their activities in the name of one religion. For example, Islam gains sympathy from some of the world's Muslim communities for various forms of support for their actions. After the

dissolution of Islamic-themed mass organizations in 2020, it is suspected that it will lead to many small combatants in the community. For researchers, this is very worrying because it threatens national stability and leads to internal and even external conflicts. Researchers will look at several existing patterns, especially in West Sulawesi province. Where the community adheres to Nusantara Islam or traditional NU, but the seeds of radicalism after the dissolution of mass organizations in 2020. This does not rule out the possibility of appearing as small groups that are softer or more acceptable to the community who have not been exposed before. Researchers used conflict prediction models to analyze the pattern of radicalism in communities from three districts in West Sulawesi province (Mamuju, Majene, Polewali Mandar) to examine emerging threats and influence policy. In addition, researchers also used the concept of public policy to create regulations and policies for policymakers to avoid future threats to the public interest.

**Keywords:** *conflict; terrorism; threat; radicalism*

## Pendahuluan

Gerakan radikal yang hadir di Indonesia banyak muncul berupa sekte, aliran, mazhab baru yang mengatas-namakan agama tertentu. Pada penelitian ini memiliki kasus agama tertentu, yaitu Islam. Gerakan radikal yang berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi alam yang eksis di daerah penganutnya. Perkembangan isu radikalisme di Indonesia seperti kelompok yang mengklaim dirinya Al-Qaeda dan ISIS (Parolin, 2010). Hal tersebut menjadi isu global, karena munculnya beberapa kelompok yang merupakan format perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Ditambah dengan pengaitan beberapa kebijakan yang tidak adil para pemimpin dunia terhadap Palestina, kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara muslim. Bahkan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme. Ditambah pemimpin dunia Islam juga dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan barat. Oleh karena itu, isu tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jaringan internet atau dunia maya bahkan bukan saja menyebar di negara-negara non-Muslim. Akibatnya, banyak kebijakan pemerintah dunia yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan dari negara masing-masing.

Radikalisme jika ditinjau dari segi bahasa (etimologi) berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Pada bahasa Inggris, kata *radical* dapat dimaknai ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental (Hornby, 2000). Istilahnya lainnya mengenai *radicalism* artinya sebagai doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham yang ekstrim (Nuh, 2009). Radikalisme sering dimaknai sangat berbeda oleh beberapa kelompok kepentingan. Misalnya di lingkup keagamaan saja, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan (Rubaidi, 2007). Sementara di dalam ilmu sosial, radikalisme sendiri diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi

yang dianutnya (Hasani & Naipospos, 2010). Jadi, radikalisme sendiri merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif yang sangat beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Ciri-ciri radikalisme diidentifikasi dengan motif seperti sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat membuat kelompok radikal tersebut merasa benar sendiri, maka secara langsung mereka telah bertindak angkuh seakan-akan merebut otoritas Allah. Ciri lainnya adalah radikalisme mempersulit agama Islam yang sebetulnya toleran (*samhah*) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh adalah haram. Misalnya, lebih memprioritaskan persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer, seperti memanjang jenggot dan meninggikan celana di atas mata kaki. Kemudian, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragam yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode *bi al-hikmah*, seperti yang digunakan oleh Nabi SAW hingga dakwahnya membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan (Masduqi, 2012). Kelompok yang radikal biasanya kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Padahal, umat Islam sejatinya dianjurkan berdakwah dengan cara yang santun dan menghindari kata-kata kasar. Selain itu, kelompok radikal mudah sekali berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya.

Mereka selalu memandang orang lain dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positif, karena berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Terakhir, biasanya kelompok radikal mudah sekali mengkafirkan (*takfir*) orang lain yang berbeda pendapat. Di masa saat ini identik sekali dengan *jamaah takfir wa bid'ah* dan kelompok-kelompok puritan. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tinggi tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka, karena mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya (Masduqi, 2012).

Selain itu, menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), indikator dan ciri yang melekat pada sebuah gerakan yang cenderung radikal bahkan bisa memunculkan tindakan teror, seperti sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan sikap. Ciri-ciri menurut BNPT dapat dikenali dengan sikap dari paham radikalisme, yaitu: (1) intoleran, seperti tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; (2) fanatik, biasanya selalu merasa benar sendiri dan yang lain salah; (3) eksklusif, yaitu tertutup dan mengambil jarak dengan umat Islam secara umum yang bukan kelompoknya, dan (4) revolusioner, misalnya cenderung menggunakan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan di Indonesia, kemunculan gerakan-gerakan radikal menjadi lebih nyata, ketika seiring perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Ditambah hadirnya keturunan orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia dan membawa ideologi baru yang akhirnya mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang mereka bawa ini lebih keras dan tidak mengenal toleransi, karena banyak dipengaruhi oleh Mahzab Maliki yang diadaptasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Secara historis, Indonesia banyak memiliki peristiwa radikalisme Islam yang diyakini menjamur pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Walaupun, Islam di Indonesia sangat dipuji dengan segala macam bentuk toleransinya. Namun, hal tersebut dirusak oleh berbagai peristiwa yang melibatkan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Misalnya, kehadiran beberapa organisasi Islam radikal di Indonesia yang sudah mencitrakan Islam sebagai agama teroris (Dijk & Kaptein, 2016).

Sejak Kartosuwirjo memimpin operasi di tahun 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama, dan sebagainya. Gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi tentu saja gerakan ini muncul kembali di masa pemerintahan Soeharto. Bedanya adalah gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa militer atau melalui intelijen, melalui Ali Moertopo dengan operasi khususnya. Ada juga, BAKIN (sekarang BIN) yang merekayasa bekas anggota DI/TII (bekas bentukan Kartosuwirjo) sebagian direkrut lalu diperintahkan untuk melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka memojokkan agama Islam. Setelah itu, sejak jatuhnya Soeharto, di era demokratisasi dan masa-masa kebebasan yang secara tidak langsung hal tersebut membuat kelompok tersebut lebih melancarkan aksinya, seperti lebih militan dan lebih vocal. Tambahan lagi, dengan adanya liputan media yang semakin bebas berpendapat, khususnya media elektronik, sehingga gerakan tersebut jadi lebih tampak di permukaan (Asgart, 2002).

Setelah DI, kemudian muncul Komando Jihad (Komji) di tahun 1976 yang meledakkan tempat ibadah. Di tahun 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia pun melakukan hal yang sama. Lalu ada pula tindakan teror yang dilakukan oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam di tahun 1978 yang setelahnya ketika pasca reformasi muncul gerakan yang sangat radikal dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M.Top. Dimana setelah era mereka, gerakan-gerakan radikal lainnya bertebaran di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon, dan yang lainnya (Mubarak, 2008). Semangat radikalisme ini pastinya tidak luput dari persoalan politik, dimana persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Hingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya.

Selain historis radikalisme di Indonesia dan pertumbuhannya yang sangat pesat dengan fokus pada “kemungkaran” ada empat dimensi untuk meminialisir radikal, seperti pertama, menyingkirkan kemungkaran dan menggantinya dengan kema’rufan, kemudian kedua, menyingkirkan kemungkaran dengan

mengurangnya walaupun tidak menghapuskan secara keseluruhan. Ketiga, biasanya memilih opsi untuk menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran serupa, dan keempat bisa juga menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih jahat dari yang biasanya. Dari ke-empat pengelompokan dalam meminimalisir radikalisme, untuk bagian pertama dan kedua merupakan penanggulangan radikalisme yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sementara bagian ketiga merupakan penanggulangan radikalisme ijtihadi, sedangkan yang ke-empat merupakan penanggulangan radikalisme yang dilarang.

Beberapa masyarakat Indonesia secara umum bereaksi jika ada hal sesuatu dimana agamanya (Islam) dilecehkan, mereka akan bereaksi keras, cenderung berlebihan, kasar, dan penuh makian, cenderung memiliki sikap radikal. Lihat saja pada saat Presiden Prancis, Macron yang “mereka” nilai selalu mendiskreditkan umat Islam. Macron mengatakan, Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia (Momtaz, 2020). Selain itu, Macron juga menambahkan sekularisme adalah pengikat persatuan Prancis dan jangan terperangkap oleh kelompok ekstrimis yang dimana tujuannya melakukan stigmatisasi terhadap seluruh Muslim. Hampir masyarakat Muslim di seluruh dunia menunjukkan reaksinya, seperti Saudi, Qatar, dan Turki termasuk Indonesia. Banyak reaksi-reaksi masyarakat Indonesia yang memboikot produk-produk Prancis dan lain hal sebagainya.

Padahal, Macron sendiri saat itu sangat normative sebagai kepala negara, mengingat Prancis adalah negara Eropa yang paling banyak mengalami kasus rentetan radikalisme yang ironisnya mengatasnamakan Islam. Salahnya Macron adalah tidak menyadari sebelum membuat statement tersebut bahwa aksi radikalisme dan terorisme yang sebenarnya adalah tidak memiliki agama. Hanya saja bagi seluruh umat Muslim dunia dan termasuk Muslim Indonesia, pernyataan Macron melukai hati seluruh Muslim dunia (Bahrawi, 2021). Kasus selanjutnya, pada Kelompok FPI (Front Pembela Islam) oleh Rizieq Shihab, yang pada tahun 2021 sudah dibubarkan kelompoknya. Rizieq Shihab bersama FPI seringkali menghujat Densus 88 dan memuji ISIS dalam beberapa kesempatan. Hal tersebut adalah pengaruh bagi masyarakat baik yang masih awam bagi pengikut FPI untuk terpengaruh. Maka, FPI diputuskan untuk dibubarkan karena banyak sekali beberapa aksi dan tindakannya merugikan masyarakat, negara, dan ancaman bagi stabilitas nasional. Selain FPI, ada HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan beberapa organisasi yang mengarah ke aksi radikalisme juga dibubarkan saat itu (Zone, 2020).

Banyak sekali kasus kejadian dalam rentetan peristiwa yang mulai marak di tahun 2009 hingga kini, karena pemerintah dulu terlalu membiarkan ormas-ormas dan aksi masyarakat yang mengarah ke radikalisme. Ditambah, mudahnya akses bepergian ke luar negeri bagi warga negara Indonesia ke negara-negara kombatan teroris untuk berlatih di sana. Bahkan ada beberapa yang berani melepas status kewarganegaraan Indonesianya, karena sudah tanggung benci dengan pemerintah Indonesia. Di Indonesia sendiri, pasca pembubaran ormas-ormas yang bertemakan Islam di tahun 2020, ditengarai akan menimbulkan banyak kombatan-kombatan

kecil di tengah masyarakat. Bagi peneliti ini sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut menimbulkan ancaman bagi stabilitas nasional yang mengarah konflik internal bahkan eksternal. Bagi peneliti, fenomena atau pola inilah yang akan diteliti khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti akan melihat beberapa pola yang ada, dimana masyarakatnya menganut NU tradisional tetapi bibit-bibit radikalisme pasca pembubaran ormas di tahun 2020, tidak menutup kemungkinan muncul sebagai kelompok-kelompok kecil yang lebih *soft* atau lebih bisa diterima masyarakat baik yang belum terpapar sebelumnya sama sekali. Selain itu, Sulawesi Barat yang jumlah penduduknya sekitar 1.400.000 lebih penduduk (Statistik, 2021) rata-rata masih menganut paham NU tradisional dengan berbagai macam adat istiadatnya. Jadi, hal yang mungkin bisa terjadi terpapar radikalisme. Nyatanya, radikalisme yang muncul di Sulawesi Barat datang dari luar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, bahkan dari luar negeri) bukan berasal dari masyarakat Sulawesi Barat itu sendiri. Apalagi ditambah, dengan berpindahnya ibukota negara nanti di Penajam, Kalimantan Timur akan memicu hal tersebut menjadi “driver” yang kuat untuk akses-akses radikalisme di Sulawesi Barat.

Dalam pengaplikasiannya, peneliti menggunakan konsep *conflict prediction models*. Peneliti meyakini bahwa, dalam sebuah kasus atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat, baik akan mempengaruhi aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, ketahanan, dan aspek kontemporer lainnya. Jadi diperlukan analisis, dan perencanaan. Di mana beberapa aspek jika terganggu akan menjadi ancaman skala nasional maupun internasional. Sebagai pembuat kebijakan (aktor) harus siap dengan hasil yang ditimbulkan, seperti kekacauan dan kekerasan yang biasanya direspon dengan serangkaian tindakan reaktif dan tindak terintegrasi. Bahkan, pada situasi kompleks akan lebih jauh bisa muncul jika tidak ada tanggapan dari aktor atau tanggapannya tidak terlalu efektif. Jadi, ada beberapa upaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut, dalam konsep *conflict prediction models* ini dikembangkan *early warning system* atau pendeteksian dini yang menata konflik yang sekiranya akan muncul dalam beberapa jangka, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Ditambah, sistem ini juga membantu masyarakat luas atau pola, variable structural, dimana hal tersebut adalah untuk membantu meramalkan dinamika kompleks yang dapat mengakibatkan konflik atau ketidakstabilan. Tujuannya adalah memberi si aktor (pembuat kebijakan) lebih banyak waktu untuk mengambil tindakan pencegahan dan deteksi dini sebelum konflik dan ancaman muncul ke permukaan (Barton, Hippel, Sequira, & Irvine, 2008).

Peringatan dini atau pendeteksian dini dari *conflict prediction models* pada penelitian ini menawarkan gambaran deskriptif dan analisis. Beberapa indikatornya berupa input data yang dimasukkan dan dipantau secara teratur dan harus dapat menceritakan sebuah cerita tentang arah suatu negara atau bagian dari suatu negara. Misalnya ada indikator sebagai berikut, keamanan, pemerintahan, keadilan dan rekonsiliasi, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan lintas sektor. Kemudian, digunakanlah indikator tersebut karena dirasa lebih penting daripada mendengar si pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu dari konflik ata

kasus yang mencuat. Pasalnya, deteksi dini atau peringatan dini lebih keada penggambaran di lapangan atau fakta dan bisa saja terjadi bias. Oleh karena itu, model yang dirancang dengan baik dan menggunakan indikator dari informasi yang mendalam dan dapat dipercaya, seringkali dapat menghindari konflik atau ancaman yang muncul. Mala, dalam pemberian deteksi dini dan peringatan dini, harus didahului dengan kegiatan penyelidikan dan pengumpulan data di lapangan.

Kemudian, konsep selanjutnya yang digunakan peneliti adalah konsep kebijakan publik. Dikarenakan, peneliti menginginkan setelah penelitian yang diambil kesimpulan dapat digunakan oleh beberapa pengambil keputusan untuk dikeluarkan beberapa kebijakan untuk mereduksi atau merendam kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dari kasus yang diteliti oleh peneliti terkait terorisme. Dari keputusan-keputusan yang dilakukan seseorang yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal, biasanya disebut kebijakan publik. Dimana proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda *setting* semua pihak dalam pemerintahan. Bagi pemerintah atau aktor, melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan bisa menjadi kebijakan publik (Nugroho, 2003). Pada kebijakan publik yang diikuti reformasi, biasanya melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik, seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan yang dimana tindakan tersebut berdasarkan kepentingan kepada publik. Selain itu, kebijakan publik juga bertujuan untuk membentuk sebuah pencapaian dari visi misi dan tujuan kebijakan tersebut agar tercapai sesuai yang diharapkan. Tentunya berdasarkan formulasi kebijakan atas evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Dikarenakan, setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan kontinuitas dari kebijakan yang pernah ada.

Dalam pengambilan keputusan, sebelum dan sesudahnya bisa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan menjadi pola yang penting dalam mengetahui apakah kebijakan suda diimplementasikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang baik, kecepatan dalam pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari evaluasi kebijakan, akan mendapatkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya. Dalam hal ini, kebijakan publik juga merupakan bagian dari penentu kesuksesan negara penciptaan ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Proses kebijakan yang diawali dengan proses pengkajian terhadap kebijakan publik. Kajian terhadap kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan. Selain itu, masyarakat Sulawesi Barat sendiri tetap menjaga keutuhan beragama dan meminimalisir kejadian-kejadian radikalisme dengan tetap menjaga kegiatan kebudayaan atau menjaga yang sudah menjadi tradisi dan dijalankan sejak dulu.

## Metode

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian. Pendekatan metodologis edua yang akan digunakan adalah *process tracing* (pelacakan proses). *Process tracing* merupakan suatu metode analisis kualitatif yang mencoba untuk “melihat dan mencari bukti-bukti empiris dalam suatu fenomena spesifik dengan tujuan baik untuk menciptakan maupun menguji suatu penjelasan alternatif akan kasus tersebut” ” (Levy, 2002). Metode ini pada dasarnya juga melibatkan mekanisme pencarian penjelasan historis serta ilustrasi kronologis dari suatu isu atau peristiwa yang dapat memberikan pengetahuan baru ataupun menguji relevansi dari basis teori sebelumnya.

Lebih jauh, *process tracing* sangat umum digunakan untuk membuktikan ekspektasi hubungan sebab akibat antar variable penelitian yang didasarkan oleh teori ataupun mencari tahu jika terdapat relasi kausal antar variable-variabel yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini sendiri, jenis spesifik dari *process tracing* yang digunakan adalah *inductive process tracing* (pelacakan proses induktif). Dengan kata lain, tanpa membangun hipotesis ataupun ekspektasi teoritis yang mendetail, peneliti akan langsung melakukan observasi empiris. Hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu situasi *real* dari hubungan kausal antar variable yang diteliti, serta untuk mendapatkan gambaran kontekstual akan hubungan tersebut. Dalam penelitian ini memberikan gambaran terkait perkembangan kelompok-kelompok radikal pasca pembubaran ormas yang dilarang oleh pemerintah di tahun 2020 dan pengaruhnya terhadap masyarakat Sulawesi Barat di tiga kabupaten.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah aktivitas dan beberapa kelompok pecahan dari ormas yang telah dibubarkan dan merekrut banyak anggota dengan cara yang biasa atau lebih *soft* agar masyarakat awam tidak menyadari bahwa kelompok tersebut didirikan oleh orang-orang yang dulunya tergabung dalam organisasi radikal. Selain itu, peneliti juga dari kelompok remaja yang terlibat dalam kegiatan perdagangan narkoba. Selain itu juga akan mengamati perihal kebijakan pemerintah daerah khususnya instansi terkait dalam pengelolaan terhadap gerakan TNOC di Sulawesi Barat. Lalu, Model pada penelitian ini adalah gambaran, acuan, atau ragam yang akan dirancang untuk mewakili fakta dan hasil analisis. Model pada penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel-variabel dari pengukuran urgenitas dan pendeteksian dini dari potensi ancaman ex-organisasi radikal di Sulawesi Barat. Hasil dari pengukuran ini, maka akan menghasilkan beberapa pencegahan untuk masyarakat Sulawesi Barat dalam menghadapi transformasi *radical organization* ke depannya.

Sementara itu, Penelitian ini menekankan pengumpulan data melalui berbagai metode antara lain: (1) Metode wawancara (*interview*) dilakukan dengan pihak yang memiliki authority dalam topik penelitian ini baik instansi pemerintah maupun kepolisian. (2) Metode berbasis dokumen (*document-based research*) yang terdiri atas dokumen primer dan dokumen sekunder serta (3) Metode



berbasis internet (*internet-based research*). Hasil dari pengumpulan data ini selanjutnya diakumulasikan dan dianalisis.

Analisis data pada penelitian kualitatif ini adalah menggunakan konsep *conflict prediction models*. Dimana, konsep ini mengatur tren dan pola dari subjek yang diteliti. Selain itu, konsep *conflict prediction models* akan dianalisis menggunakan pendekatan intelijen, dengan maksud untuk pencegahan dini atau pendeteksian dini. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menangani masyarakat Sulawesi Barat yang terpapar dan masih terpapar radikalisme. Selain itu, konsep yang digunakan adalah kebijakan publik. Ini dimaksudkan untuk memberitahu bahwa peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat diperlukan, agar masyarakat sadar akan bahayanya mengikuti atau menganut paham radikalisme. Untuk lokasi penelitian dilakukan di provinsi Sulawesi Barat dengan terfokus pada tiga kabupaten yaitu, kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Dipilihnya ketiga kabupaten tersebut, karena paling banyak masyarakat pendatang dari luar pulau Sulawesi dan luar Sulawesi Barat. Hal ini pastinya, akan banyak mempengaruhi sifat dan pola pikir masyarakat di tiga kabupaten tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian dalam kasus ini, peneliti menekankan pengumpulan data melalui berbagai metode antara lain; metode wawancara (*interview*) dilakukan dengan pihak yang memiliki *authority* dalam topik penelitian ini baik instansi pemerintah maupun pemerintah maupun kepolisian, kemudian ada pun metode berbasis dokumen (*dokumen based research*) yang terdiri atas dokumen primer dan dokumen sekunder, serta metode berbasis internet (*internet-based research*). Dari sinilah kemudian pengumpulan data diakumulasikan dan dianalisis. Ada dua jenis metode wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu menggunakan wawancara singkat menggunakan penyebaran kuisisioner *online* dan wawancara dengan institusi yang berkompeten. Dalam hal ini, peneliti akan menyamakan institusi mana saja, peneliti mendapatkan data yang *real*.

Pada wawancara singkat dengan menggunakan kuisisioner *online* terdapat sekitar hampir seratus responden acak yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Barat, khususnya dari tiga kabupaten, yaitu Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Ada 103 responden yang mengikuti wawancara singkat melalui kuisisioner *online*, semua responden adalah warga provinsi Sulawesi Barat yang berada di tiga kabupaten sebagai target penelitian.

### 1. Grafik Hasil Penelitian

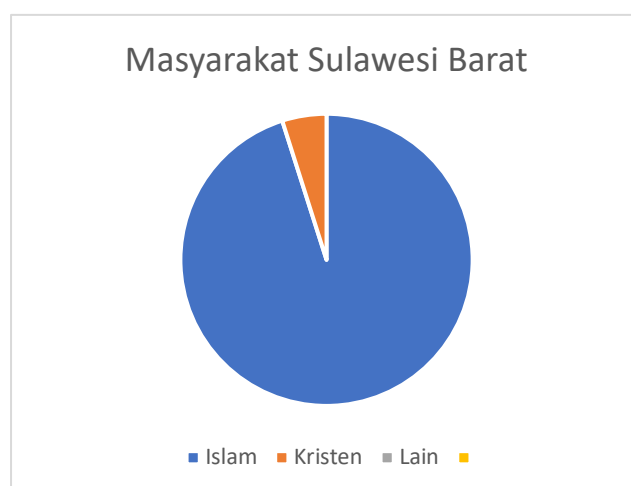
Per tahun 2021 bulan Juni, provinsi Sulawesi Barat tercatat mengantu agama Islam sebanyak 1,21 juta jiwa dari total jumpal populasinya sebanyak 1,44 juta jiwa. Sisanya memeluk agama Kristen dan Hindu. Kemudian, di Sulawesi Barat masih menganut asas kebudayaan yang sangat kental, bisa dikatakan memiliki aliran Islam Nusantara atau Nahdatul Ulama yang sering digunakan dan dijadikan tolak ukur dalam beragama di Sulawesi Barat. Walaupun ada masyarakat yang

sudah tidak menggunakan atau mengamalkan nilai-nilai kebudayaan dalam beragama. Dimana hal itu sebetulnya tidak tercantum dan tertulis di dalam Al-Quran.

Pada wawancara singkat responden yang menggunakan kuisioner *online* ada 103 masyarakat Sulawesi Barat dari tiga kabupaten yang ikut berpartisipasi. Ada 97 orang yang beragama Islam, 5 orang yang beragama Kristen, dan sisanya adalah agama lain (**Diagram 1**).

**Diagram 1.** Identifikasi Agama Responden Masyarakat Sulawesi Barat di 3 Kabupaten

Kemudian dalam pertanyaan wawancara, banyak responden yang tidak mengerti atau menjawab sepemahaman mereka apa yang dimaksud oleh Republik

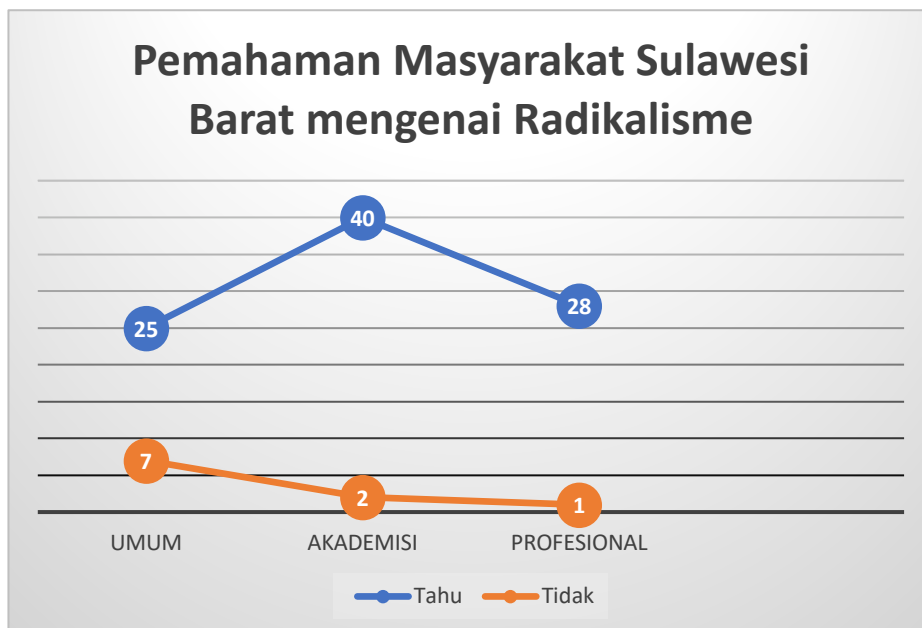


Indonesia. Dari 103 responden, peneliti kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu masyarakat umum, akademisi yang termasuk dosen, guru, dan mahasiswa, dan profesional termasuk dari berbagai profesi di instansi daerah. Jawaban yang muncul, Indonesia adalah negara kepulauan, NKRI harga mati, Bhineka Tunggal Ika, dan beberapa menjawab tidak tahu (**Grafik 1**). Hal ini nanti akan mempengaruhi jawaban dari pertanyaannya selanjutnya. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah masyarakat mengetahui pengertian dari radikalisme termasuk apa saja bentuk radikalisme. Dari tiga tipe responden, menghasilkan bahwa responden mengetahui apa itu radikalisme, walaupun tidak secara tepat dari makna radikalisme. Tetapi, responden sudah benar-benar mengetahui dan sadar bahwa apa pun bentuk radikalisme adalah arti dan tindakan yang negatif dan yang tidak patut ditiru (**Grafik 2**). Pada **Grafik 3**, responden dihadapkan pada pertanyaan apakah masyarakat Sulawesi Barat mengetahui beberapa kelompok radikal yang dilarang oleh pemerintah. Ada beberapa jawaban yang agak berbeda dari kebanyakan jawaban. Pengelompokkan jawaban dari tiga tipe, dimana responden umum kebanyakan tidak ingin bergabung dari kelompok radikal, begitu

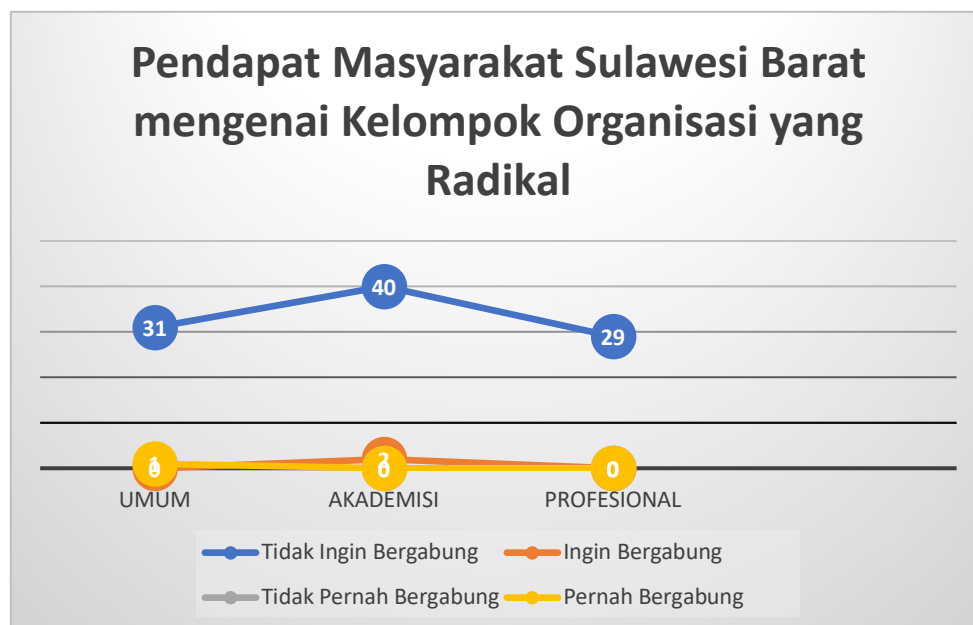
juga kelompok profesional, walaupun ada beberapa jawaban yang menyatakan mereka ingin bergabung ke kelompok radikal dari responden akademisi.



**Grafik 1.** Identifikasi Pengetahuan Masyarakat Sulawesi Barat mengenai Indonesia



**Grafik 2.** Identifikasi Pemahaman Masyarakat Sulawesi Barat mengenai Radikalisme



**Grafik 3.** Identifikasi Pendapat Masyarakat Sulawesi Barat mengenai Kelompok Organisasi yang Radikal

## 2. Analisa Penggunaan Konsep

Dari hasil penelitian wawancara singkat, bisa ditarik kesimpulan perwakilan responden untuk masyarakat Sulawesi Barat di tiga kabupaten pada saat ini tidak akan terkena dampak radikalisme. Dikarenakan, masyarakat Sulawesi Barat masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dalam beragama. Hal ini yang masih dijaga hingga sekarang. Walaupun ada beberapa masyarakat yang sebelumnya sempat bergabung dalam kelompok-kelompok radikal seperti HTI dan JI. Dari data yang didapatkan, peneliti menyimpulkan masih banyak pecahan-pecahan kelompok organisasi yang dianggap radikal berkumpul dan membentuk kelompok-kelompok kecil yang hingga sekarang bekas pengikutnya diawasi oleh institusi pemerintah seperti kepolisian. Jika dilihat dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, ketahanan, dan aspek lainnya, untuk menganalisa ancaman yang muncul dalam jangka pendek sekaligus jangka menengah, masyarakat Sulawesi Barat untuk saat ini bisa dikatakan tidak akan bergabung dengan pecahan-pecahan kelompok eks-radikal, karena dilihat dari budayanya yang sangat kental dan menjunjung tinggi budaya lokal (*malaq'bi*).

Jangka panjangnya, pemerintah daerah seharusnya perhatian akan permasalahan dan ancaman yang akan muncul dengan kritis menggunakan *early warning* atau pendeteksian dini jika ingin mencegah ancaman-ancaman yang akan masuk ke wilayahnya, seperti ancaman paham radikalisme. Mengingat ibukota baru di Penagan, Kalimantan Timur akan segera ditempati dan beroperasi di tahun 2024. Dimana, ibukota baru, Penajam, Kalimantan Timur yang bersebelahan

dengan wilayah Sulawesi Barat. Bisa ditarik kesimpulan, wilayah Sulawesi Barat nantinya akan menjadi lintas laut beberapa kapal perdagangan dan jasa transportasi. Tidak menutup kemungkinan, akan banyak masyarakat dari provinsi lain bahkan atau dari luar negeri yang akan berdatangan dan menetap. Kita ketahui luas wilayah Sulawesi Barat adalah wilayah yang subur, daerah pesisir, dan pegunungan (dataran tinggi) di kabupaten Mamasa.

Pola dari konsep *early warning* bisa dikatakan masyarakat Sulawesi Barat khususnya tiga kabupaten yang diteliti tidak akan tergugah untuk masuk bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan radikal bahkan bergabung dalam kelompok eks-radikal yang sempat dibubarkan oleh pemerintah. Kita ketahui, pemerintah hingga kini tetap mengawasi beberapa kelompok-kelompok eks-radikal yang mendirikan kelompok lain dengan kegiatan keagamaan yang sama namun cenderung tidak *show up* ke permukaan. Lebih kepada berjalan *silent* dan tidak memikat banyak masyarakat sekitar, walaupun tujuannya kurang lebih sama (lebih *soft*). Misalnya, ceramah sewajarnya, berkumpul di mesjid dengan jamaah umum, atau bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sebelumnya, dimana kelompok-kelompok eks-radikal ini ketika masih bergabung di HTI atau JI tidak pernah bergaul atau bersosialisasi dengan orang atau lingkungan di luar mereka.

Variabel-variabel yang kemudian berhubungan dari kasus ini adalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Aspek politik, masyarakat Sulawesi Barat yang rentan terpapar dan tergabung kelompok radikal biasanya akan benci pada salah satu atau beberapa tokoh-tokoh politik dan pemimpin negara. Biasanya efek ini akan mengganggu kenyamanan dan ketentraman lingkungan sekitar. Apabila orang lain atau salah satu keluarga dan relasinya tidak memilih salah satu tokoh yang dipuja, mereka tidak segan-segan untuk membenci satu sama lain atau melakukan tindakan yang tidak masuk akal, misalnya, ujaran kebencian di sosial media atau melakukan demo dengan kelompoknya. Hal ini juga berlaku pada aspek sosial dan aspek budaya. Mereka yang dulunya tergabung dengan kelompok eks-radikal tidak lagi menjunjung tinggi asal muasal mereka dan budaya mereka. Bahwa banyak mereka yang tidak toleran akan budaya yang digabungkan dengan kegiatan agama.

Dijelaskan bahwa, mereka selalu memandang orang lain di luar kelompok mereka dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positif, karena berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Selalu mengkafirkan dan bid'ah.

Selain itu, kelompok ini biasanya sering melakukan kekerasan. Bentuk antisipasi oleh pemerintah adalah selalu mengawasi orang-orang dari eks kelompok radikal dan beberapa kelompok yang terbentuk paska organisasi atau kelompok eks-radikal dibubarkan oleh pemerintah.

Dari konsep *early warning* atau pendeteksian dini, baiknya pemerintah dan pemda bekerja sama juga dengan beberapa institusi terkait mencegah kombatan-kombatan muncul ke permukaan dan mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat. Mungkin untuk jangka pendek dan menengah, pemerintah tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, karena terlihat sekali mana saja masyarakat yang sekiranya yang intoleran, fanatik, eksklusif (hanya ingin bergaul

dengan kelompoknya), dan revolusioner (misalnya cenderung menggunakan tindak kekerasan). Sifat-sifat seperti itu patut dihilangkan, apalagi jika untuk jangka panjang apabila ibukota negara sudah berjalan dan banyak sekali lintas manusia dan jasa yang akan datang ke provinsi Sulawesi Barat. Apabila ini terjadi, dan mengubah tatanan sosial, politik, dan ekonomi pada masyarakat di Sulawesi Barat yang masih homogen, gerakan-gerakan radikal dari luar daerah maupun pengaruh luar negeri akan menjadi lebih nyata. Tidak hanya budaya yang akan tergerus hilang, melainkan akan melibatkan agama sebagai bentuk pergerakan mereka.

Maka, pemerintah harus memperhatikan keamanan akan ancaman yang akan datang nantinya. Kemudian, adanya keadilan dan rekonsiliasi di provinsi Sulawesi Barat, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperhatikan banyak fasilitas yang bisa menunjang keberlangsungan hidup masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya kabupaten Polewali Mandar yang termasuk paling banyak masyarakatnya dan mulai heterogen per tahun 2021, lalu kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan, dan kabupaten Mamuju sebagai roda pemerintahan. Sejatinnya, sebagai pemerintah daerah, jika menggunakan konsep kebijakan publik, membuat beberapa kebijakan yang meminimalisir ancaman jangka pendek dan jangka panjang yang akan datang terkait radikalisme di Sulawesi Barat. Dikhawatirkan tindakan bagi orang-orang yang dulu pernah tergabung dalam kelompok eks-radikal akan melakukan banyak aksi, dimana dapat merugikan masyarakat, juga negara, dan ancaman bagi stabilitas nasional tentunya.

Jika, masih terdapat konflik antar masyarakat dan di daerah sendiri akan menimbulkan konflik internal yang nantinya akan melebar ke eksternal, hal ini pastinya akan mengganggu stabilitas nasional. Banyaknya kombatan teroris yang berlalu lalang, dapat terbuka lebar masuk ke wilayah provinsi Sulawesi Barat, bercampur dengan masyarakat dan menyebarkan paham-pahamnya secara *soft issues*. Ditambah lagi, jika ibukota baru di Kalimantan sudah aktif, hal ini bisa membuat masuk orang-orang dari luar bahkan asing. Yang dikhawatirkan lagi, selain banyaknya paham-paham radikal, juga akan menimbulkan ancaman *non traditional crime*, pastinya termasuk terorisme, *human trafficking*, *illegal logging*, *illegal weapon*, dan yang paling meresahkan adalah *drug trafficking* yang dibawa oleh para kombatan terorisme dari jalur laut dan jalur darat. Dimana narkotika tersebut dijual untuk membiayai gerakan-gerakan radikal tersebut. Pemerintah daerah harus lebih pintar membuat aspek-aspek kebijakan yang akan digunakan pada publik nantinya, seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun dalam hal pengevaluasian kebijakan. Dimana tahap-tahap kebijakan tersebut harus sesuai dengan masyarakat yang akan menggunakannya. Pemerintah juga harus paham akan pola-pola masyarakat agar kebijakan yang dibuat lebih tepat dan solutif untuk mengurangi ancaman yang akan pada jangka pendek dan jangka panjang.

## Kesimpulan

Dalam mengurangi ancaman yang muncul pada kasus kekhawatiran masyarakat yang dulu tergabung dengan kelompok eks-radikal dan membentuk kelompok kecilnya sendiri dengan tujuan yang masih sama tapi terlalu *silent* dan berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan pendekatan *soft* akan menjadi “*driver*”. Dimana *driver* tersebut akan bisa muncul ke permukaan menjadi sebuah ancaman. Maka, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan instansi yang terkait harus lebih memperhatikan masyarakat yang pernah tergabung dengan kelompok eks-radikal dan pembentukan kelompok lain paska pembubaran beberapa organisasi masyarakat karena dianggap radikal. Pendeteksian dini atau *early warning* bisa dilihat dari beberapa pola dan aspek yang sangat penting dalam masyarakat di Sulawesi Barat pada tiga kabupaten yang diteliti. Intinya semua kembali kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan sebuah kebijakan untuk mengurangi dan mencegah ancaman yang muncul.

## Referensi

- Asgart, S. M. (2002). *Melawan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Research Associate*, p. 1.
- Bahrawi, I. (2021). *Intoleransi dan Radikalisme*. (M. Rasyid, Ed.) Depok: Sang Khalifah.
- Barton, F., Hippel, K. v., Sequira, S., & Irvine, M. (2008). *Early Warning? A Review of Conflict Prediction Models and Systems. CSIS. Center for Strategic & International Studies, 2*.
- Dijk, K. V., & Kaptein, N. J. (2016). *Islam, Politics, and Change: The Indonesian Experience after The Fall of Suharto* (1 ed.). Leiden: Leiden University Press.
- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat.
- Hornby, A. (2000). *Dictionary of Current English*. UK : Oxford University Press.
- Levy, J. (2002). *Aualitative Methods in International Relations*. University of Michigan Press.

- Masduqi, I. (2012). Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 3.
- Momtaz, R. (2020, October 10). *Hot Topics*. Retrieved from Politico : <https://www.politico.eu/article/macron-brandishes-actions-against-radical-islam-in-face-of-criticism/>
- Mubarak, M. Z. (2008). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia .
- Nuh, N. M. (2009, Juni - September). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Fahaman atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, 9, 36.
- Parolin, C. (2010). *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London*. Australia: ANU E Press.
- Rubaidi, A. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Statistik, B. P. (2021). *BPS Sulawesi Barat*. Retrieved April 2022, from Badan Pusat Statistik: <https://sulbar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/962/jumlah-penduduk-sulawesi-barat-hasil-sensus-penduduk-2020-1-419-juta-jiwa.html>
- Zone, T. B. (2020, Desember 24). *Oke News*. Retrieved April 2022, from Oke Zone : <https://nasional.okezone.com/read/2020/12/24/337/2333310/selain-fpi-ini-ormas-yang-resmi-dibubarkan-pemerintah>